



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDI PRIADI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG SDM DAN ASET**
3. NHK : **688526**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.572.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 22.45 m2/22.45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.472.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **660.000.000**

1. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2011, HASIL SENDIRI



Rp. 180.000.000

5. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.257.677.452

F. HARTA LAINNYA

Rp. 15.000.000

Sub Total

Rp. 8.854.977.452

III. HUTANG

Rp. 1.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.854.977.452

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.